

RURAL COMMUNITY-BASED QUALITY EDUCATION (INSPIRATION OF VALUABLE LESSONS FROM EMPOWERMENT EFFORT OF EDUCATION)

Asep Sapa'at

Lembaga Pengembangan Insani - Dompot Dhuafa
syafaat_makmalian@yahoo.com

Abstract

In order to harmonize education system with the community dynamics and needs, the national education system is no longer adopting the old patterns which rely on centralized curriculum. This is the answer to the demand for the synergy of decentralization policy in an autonomy education package. There is no longer a general curriculum set up by the central government. Curriculum is now an authority of each region down to each educational unit. This is the philosophy that becomes the basic of Educational Unit Curriculum (KTSP) or known as the Curriculum 2006.

In practice, Curriculum 2006 demanded active participation from community members in the education activities. This means, every progress in education no longer depends on the central government. In contrary, it depends a lot on the education management at the level of region and school. Based on the principles in the curriculum, each region is expected to implement community-based education.

Ciracap is one of the subdistricts in Sukabumi Regency that is categorized as less-educated. This paper will describe the implementation of community-based education model in Ciracap, especially empowerment efforts to increase quality of education.

Keywords: rural community, community-based education, decentralization policy

Pengantar

Dalam upaya mengoptimalkan berbagai potensi daerah untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional di bidang pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan nasional untuk menerapkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan sekolah. Hal ini ditandai dengan adanya upaya untuk mengadopsi dan memodifikasi model "*School-Based Management*" yang sudah cukup lama diterapkan di negara-negara maju, seperti halnya Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

School-based management is the sistematic decentralization to the school level of authority and responsibility to make decisions on significant matters related to school operations within a centrally determined framework of goals, policies, curriculum, standards, and accountability (Caldwell, 2005). Dalam perspektif lain, Malen et al. (1990) menyatakan, "*School-based management can be viewed conceptually as a formal alternation of governance structures, as a form of decentralization that identifies*

the individual school as the primary unit of improvement and relies on the redistribution of decision-making authority as the primary means through which improvement might be stimulated and sustained”.

Dalam konteks implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di negara berkembang, ide utama penerapan MBS diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya sekolah yang berkualitas. Fokus utamanya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol manajemen yang menentukan arah pengembangan sekolah.

Contoh kasus yang terjadi di Papua New Guinea, India, dan Nicaragua, partisipasi wali murid dalam manajemen sekolah telah mengurangi masalah tingkat absensi guru (Patrinos and Kagia, 2007; Karim et al., 2004). Contoh lainnya di Kamboja, 3 sekolah negeri di daerah pedesaan telah mendorong terjadinya reformasi yang dapat memecahkan masalah kesenjangan pendidikan di daerah tersebut melalui pendekatan MBS (Shoraku, 2005; 2008b). Bahkan, di setiap negara yang berhasil menerapkan MBS, orang tua mengambil peran sebagai pendidik pertama bagi anak-anak mereka dan mereka bertanggung jawab dalam proses sosialisasi dini bagi anak-anak mereka (Center for Educational research and Innovation, 1997). Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan, MBS akan efektif diterapkan jika mampu mempertimbangkan faktor kritis sukses dan sesuai dengan karakteristik dan kultur masyarakat dimana sekolah itu berada. Seperti yang dinyatakan oleh Fullan (1992) bahwa suatu inovasi pendidikan di lapangan perlu didukung oleh berbagai faktor yang dapat menunjang pelaksanaan inovasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan data Suseda 2006 (Munipah et al., 2010), khusus di wilayah Kab. Sukabumi, data angka putus sekolah golongan umur 13 – 15 tahun (Tingkat SMP) adalah 32,42%, angka putus sekolah golongan umur 7 – 12 tahun (Tingkat SD) adalah 2,67%, dan angka tidak melanjutkan sekolah dari SD ke SMP adalah 42,27%. Masalah ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung anak-anak untuk bersekolah. Selain itu, kultur masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya pendidikan telah membuat anak-anak di daerah tersebut tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Situasi ini pun terjadi di SD Cigebang dan SD Jaringao yang terletak di Kec. Ciracap - Kab. Sukabumi.

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, upaya apa yang dapat dilakukan agar sekolah dapat menjadi lembaga yang mampu menyadarkan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan? Strategi implementasi MBS seperti apa yang mungkin dikembangkan agar sesuai dengan kultur masyarakat di Kec. Ciracap? Apakah program pemberdayaan masyarakat berbasis sinergitas ekonomi – pendidikan mampu menyelesaikan masalah angka melanjutkan sekolah yang terjadi di SD Jaringao dan SD Cigebang?

Kajian Teori

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu inovasi pendidikan dalam sistem pengelolaan sekolah yang diadopsi dari konsep “School-Based Management”. MBS adalah model sistem pengelolaan sekolah yang bersifat otonomi dimana sekolah memiliki kewenangan yang seluas-luasnya untuk menetapkan visi dan misi, serta

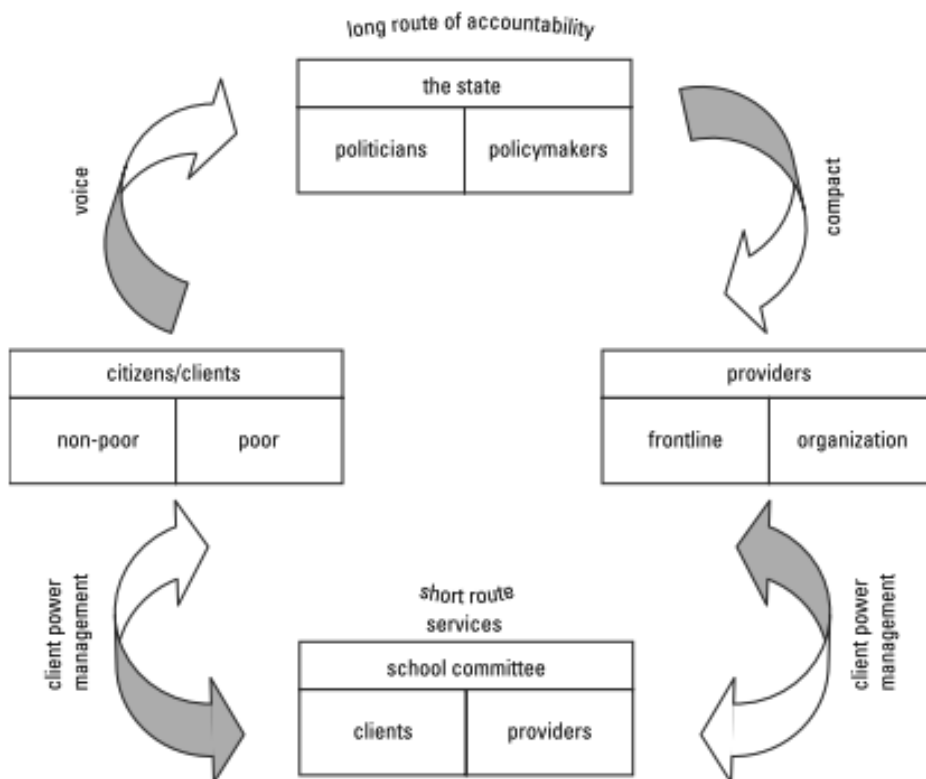
merancang berbagai program kerja yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sekolah di masa depan.

Model MBS ini telah lama diterapkan di negara-negara maju. Penelitian terhadap praktik MBS di negara maju menunjukkan bahwa model ini secara efektif mendukung peningkatan mutu pendidikan sekolah secara komprehensif dan peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam realisasi program-program sekolah yang disepakati (Calwell and Spinks, 1988). Senada dengan hal tersebut, Solkov-Brecher (Sa'ud, 2005) menyatakan bahwa di negara-negara maju pelaksanaan MBS mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan dan optimalisasi pemanfaatan potensi sekolah dan masyarakat dalam mendukung sistem pendidikan nasional.

Namun, tidak sedikit pula sekolah yang mengalami kendala dan kegagalan dalam pelaksanaan MBS. Sukses tidaknya sangat bergantung pada level otonomi yang dimiliki para pemimpin sekolah dan stakeholder sekolah lainnya. Misal, di Belanda, MBS dapat terlaksana dengan baik karena orang tua dan stakeholder sekolah dapat merancang dan menentukan sendiri arah kebijakan pengembangan sekolah. Tetapi di Argentina dan Cili, MBS kurang optimal diterapkan mengingat stakeholder sekolah tidak memiliki otonomi luas untuk menentukan arah pengembangan sekolah, meskipun sistemnya sudah desentralisasi (Education Human Development Network, 2007).

Suparlan et al. (2010) memiliki analisis sendiri terkait penerapan MBS di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di tataran teknis operasional. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Kepmen 004/U/2002 yang menetapkan adanya dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai pengganti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Komite sekolah yang keanggotaannya minimal terdiri dari 9 anggota dari kalangan masyarakat, guru, dan kepala sekolah, idealnya bisa menjalankan 2 peran strategis, yaitu (1) untuk memberikan saran dan dukungan kepada pengelolaan sekolah, bertindak sebagai penengah (mediator) antara sekolah dan komunitas, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan orang tua di sekolah; (2) memberikan rekomendasi terhadap program pengajaran, anggaran, kualifikasi guru, dan fasilitas sekolah. Sayangnya, peran strategis yang diharapkan bisa diemban oleh komite sekolah belum berjalan optimal. Beberapa kendala yang terjadi di lapangan menunjukkan (1) masih adanya oknum komite sekolah yang berfungsi hanya untuk mengumpulkan uang dari wali murid; (2) peran komite sekolah dalam pengelolaan sekolah tidak selalu mengarah kepada terwakilkannya masyarakat dan tidak juga selalu mengarah pada praktik MBS yang lebih baik; (3) kurangnya pengetahuan dan pengalaman komite sekolah tentang MBS; (4) masih adanya kekhawatiran bahwa komite sekolah tidak mewakili masyarakat karena anggotanya dipilih langsung oleh kepala sekolah; (5) pertemuan dan keputusan masih didominasi oleh kepala sekolah.

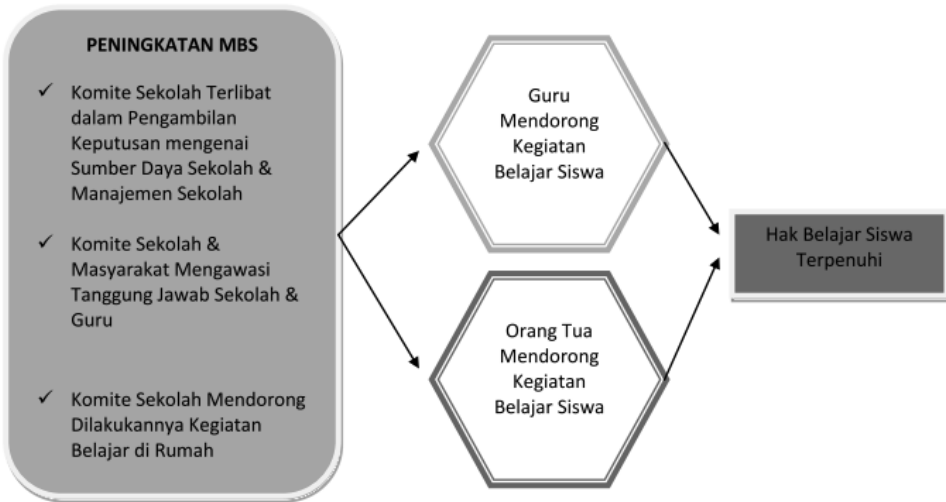
MBS hanya akan terimplementasikan dengan baik jika adanya partisipasi dari semua stakeholder sekolah. Partisipasi pun hanya akan terjadi jika para pemimpin sekolah, yaitu kepala sekolah dan ketua komite sekolah mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan sekolah. Education Human Development Network (2007) menggambarkan prinsip akuntabilitas kinerja komite sekolah dalam konteks MBS sebagai berikut.



Gambar 1:
Framework Akuntabilitas dalam Manajemen-Berbasis Sekolah

Temuan & Diskusi Pemberdayaan Komite Sekolah

Program pemberdayaan komite sekolah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan dasar di SD Cigebang dan SD Jaringao. Ikhtiar penguatan komite sekolah difokuskan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan mewujudkan kemandirian sekolah. Seperti halnya yang disampaikan Suparlan et al. (2010) bahwa penerapan MBS melalui pemberdayaan komite sekolah dihipotesiskan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, yaitu terpenuhinya hak-hak siswa untuk belajar. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut.



Gambar 2:
Manajemen-Berbasis Sekolah & Pemenuhan Hak Belajar Siswa

Komite sekolah dibentuk dengan peran utama sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator sekolah. Komite sekolah dan kepala sekolah diharapkan mampu membangun sinergi positif untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menerapkan konsep MBS. Pada awalnya, peran komite sekolah di SD Cigebang dan SD Jaringao masih terbatas pada aktivitas mengawasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program pemberdayaan komite sekolah dilakukan dengan cara menempatkan seorang pendamping mandiri yang mengambil peran edukasi, fasilitasi, dan mediasi di SD Cigebang dan SD Jaringao. Seorang pendamping lapangan menjadi ujung tombak proses perubahan selama program pendampingan dilakukan selama 2 tahun. Selama masa program, pendamping mandiri memiliki peran menyokong secara intensif keberadaan komite sekolah dengan fungsi dan perannya dalam mendukung pengembangan pendidikan di kedua SD tersebut. Strategi lain yang dijalankan dalam proses penguatan komite sekolah adalah dengan diadakannya forum pertemuan rutin bulanan yang melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Di forum tersebut selalu dilakukan pembahasan berbagai hal mengenai permasalahan sekolah secara terbuka dan dalam suasana kekeluargaan.

Melalui proses penguatan kapasitas komite sekolah, cara pandang masyarakat mengenai arti penting pendidikan mulai berubah secara perlahan-lahan. Jika dulu masyarakat masih memandang pendidikan tidak terlalu penting bagi masa depan putra-putri mereka, sekarang mereka sepakat untuk berusaha menuntaskan pendidikan putra-putri mereka minimal sampai jenjang pendidikan SMP. Karena dulu, terutama anak perempuan, jika sudah lulus SD, orang tua lebih memilih menikahnya daripada menyekolahkan ke jenjang SMP. Bahkan, setelah program penguatan komite sekolah dilakukan, sekolah memiliki cara pandang yang lebih maju dengan ditandai adanya penetapan kebijakan akan adanya pemberian sanksi kepada wali murid yang menikahkan anaknya ketika anak tersebut masih sekolah di bangku SD.

Kunci utama terjadinya proses perubahan cara pandang masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan dapat dilakukan ketika seluruh proses program pemberdayaan komite sekolah dapat memberikan solusi atas setiap masalah yang masyarakat hadapi. Semua aspirasi dan inisiatif masyarakat diwadahi dalam forum pertemuan rutin bulanan. Menempatkan stakeholder sekolah sebagai subjek program merupakan strategi jitu untuk melakukan reformasi di SD Cigebang & SD Jaringao.

Kemudian, untuk meningkatkan angka lanjut sekolah dari SD ke SMP diasiasi dengan menggulirkan program Unit Ekonomi Komite Sekolah (UEKS). Program ini menargetkan sistem pengembangan pendidikan berjalan efektif dengan dukungan wali murid yang tergabung dalam komite sekolah. Model usaha ekonomi dikembangkan dengan sistem pengelolaan modal swadaya dan tanggung renteng, serta pengembangan usaha keluarga (wali murid). Melalui UEKS, program memberikan pembiayaan dengan 2 model, yaitu UEKS dibiayai untuk aktivitas usaha berupa perdagangan, dan UEKS memberikan modal usaha kepada wali murid dengan menggunakan sistem bagi hasil. Program pembiayaan sendiri dijalankan tidak serta merta diberikan langsung kepada wali murid secara perorangan, melainkan melalui mekanisme kelompok. Para wali murid bergabung dalam kelompok-kelompok setelah melewati Latihan Wajib Kelompok (LWK). Pembentukan kelompok disesuaikan dengan usaha masing-masing yang sudah dan akan dijalankan. Bahkan di kelompok ini juga diikuti oleh beberapa guru berstatus sukwan atau suka relawan yang secara ekonomi perlu mendapat dukungan. Umumnya guru sukwan hanya mendapatkan honor Rp 50.000,- / bulan di SD Cigebang dan Rp 150.000,- / bulan di SD Jaringao.

Program ini mengarahkan kelompok dan mitra dampingan mengalami peningkatan kualitas hidup, tidak hanya pada pemenuhan soal ekonomi saja. Oleh karena itu, lokakarya wali murid dan pelatihan kewirausahaan dilakukan untuk memebuhkan jiwa kewirausahaan dan kemampuan berwirausaha bagi wali murid di SD Cigebang dan SD Jaringao. Sedangkan para mitra dampingan dibekali materi motivasi berwirausaha, analisis kelayakan usaha kecil dan strategi pemasaran, membuat proposal usaha, dan melaporkan kegiatan usaha.

Semua upaya program pembinaan dan pemberdayaan komite sekolah diarahkan pada pembentukan sikap positif, perluasan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan melalui agenda pertemuan rutin. Ketika persoalan ekonomi berangsur membaik, maka mitra dampingan tinggal memutuskan pilihan akan masa depan pendidikan putra-putri mereka.

Gerakan Lima Kilogram Gula Kelapa (GELIPA)

Potensi daerah yang paling besar di Kec. Ciracap adalah pohon kelapa dengan luas areal tanam 934 hektar untuk kelapa lokal dan 697 hektar untuk kelapa hibrida. Dengan produksi 708,96 ton kelapa lokal dan 655,41 ton kelapa hibrida seharusnya angka putus sekolah sudah tidak menjadi masalah lagi di daerah tersebut. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi.

Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan program Gerakan Lima Kilogram Gula Kelapa (GELIPA) dengan pendekatan program yang dirancang dan dijalankan dalam sistem pengembangan kemandirian sekolah melalui pemanfaatan potensi sektor ekonomi keluarga.

Potensi kelapa di wilayah Ciracap di antaranya dikembangkan oleh masyarakat setempat dengan cara diproduksi dalam bentuk gula kelapa atau gula merah. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kearifan lokal berupa kebiasaan menabung untuk keperluan keluarga di waktu-waktu mendatang. Kebiasaan menabung umumnya dilakukan untuk keperluan pembangunan rumah, pembelian perhiasan, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Tetapi, menabung untuk pendidikan anak masih jarang dilakukan warga.

Melalui program GELIPA, kearifan lokal ini digali dan dikembangkan menjadi gerakan menabung gula kelapa atau dalam bentuk uang untuk keperluan melanjutkan pendidikan anak-anak. Dengan gerakan ini, diharapkan semakin banyak warga masyarakat yang mau menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Berikut ini disajikan data jumlah mitra yang menabung di koperasi ISM Maju Bersama (SD Cigebang) dan koperasi ISM Sejahtera Bersama (SD Jaringao).

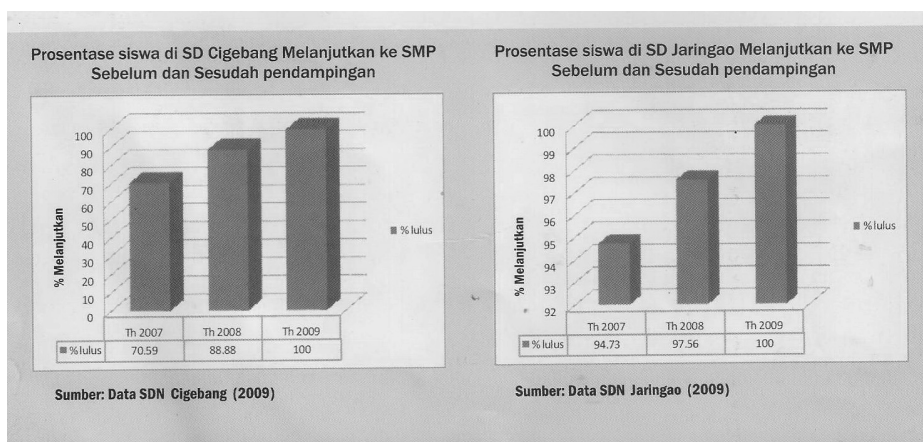
Tabel 1:
Tabungan per Kelompok Mitra Koperasi ISM Maju Bersama, Cigebang

Nama Kelompok	Jumlah Mitra	Jumlah Tabungan Gula (Kg)	Jumlah Uang (Rp)
Tumbuh Bersama	6	45	175.000
Hidup Mulia	17	72	430.000
Tani Jaya	13	63	320.000

Tabel 2:
Tabungan per Kelompok Mitra Koperasi ISM Sejahtera Bersama, Jaringao

Nama Kelompok	Jumlah Mitra	Jumlah Tabungan Gula (Kg)	Jumlah Uang (Rp)
Hidup Mandiri	13	230	1.035.000
Guru Mandiri	5	32	130.000
Mandiri Bersama	7	49	220.000
Barokah Bersama	9	40	180.000
Sejahtera Mandiri	6	27	120.000
Tumbuh Mandiri 1	11	72	340.000
Tumbuh Mandiri 2	5	25	130.000
Tumbuh Mandiri 3	8	17	75.000

Setelah 2 tahun GELIPA ini berlangsung, program ini telah berhasil menyadarkan masyarakat sekolah tentang arti penting pendidikan bagi masa depan sekaligus membantu sektor ekonomi wali murid menjadi lebih baik. Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP bisa dijadikan rujukan mengenai efektivitas keberlangsungan program GELIPA. Berikut ini disajikan data mengenai hal tersebut.



Gambar 1
Grafik Perbedaan Prosentase Siswa SD
yang Melanjutkan ke SMP Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Kesimpulan

MBS merupakan suatu model inovasi pendidikan yang perlu dikembangkan dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta dibangun atas dasar rasa memiliki yang tinggi terhadap maju dan berkembangnya institusi sekolah di masa mendatang. Pengalaman program pemberdayaan komite sekolah di SD Cigebang dan SD Jaringao dilakukan dengan mempertimbangkan modal sosial dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat setempat. Program harus dilakukan secara komprehensif untuk memecahkan masalah yang dihadapi sekolah.

Program pemberdayaan sinergitas ekonomi dan pendidikan secara terintegrasi mampu memahamkan masyarakat Ciracap tentang arti penting pendidikan bagi masa depan generasi penerus mereka, membiasakan gemar menabung untuk pendidikan, sekaligus memfasilitasi kegiatan ekonomi sehingga mereka memungkinkan untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan SMP.

Implementasi MBS perlu dilakukan dengan cara-cara kreatif dimana pendekatan program harus berorientasi pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi sekolah, melibatkan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan partisipatif, mampu memberdayakan potensi lokal masyarakat, serta mampu melayani hak-hak belajar siswa secara optimal.

Referensi

- Caldwell, B. J. (2005). "School-based Management." Education Policy Series. The International Institute for Educational Planning and The International Academy of Education, Paris and Brussels.
- Calwell, B. J. and Spinks, J. M. (1998). "Towards the Self-Managing School." London: The Falmer Press.
- Centre for Educational Research and Innovation (1997). "Parents as Partners in Schooling." Paris: OECD.

- Education Human Development Network (2007). "What is School-Based Management." Tersedia di http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/.../what_is_SBM.pdf.
- Fullan, M. (1992). "The Meaning of Educational Change." Toronto: OIE Press.
- Karim, S., C. A. Santizo Rodall, and E. C. Mendoza (2004). "Transparency in Education." International Institute for Educational Planning and International Academy of Education. Paris and Brussels: UNESCO.
- Malen, B., R. T. Ogawa, and J. Kranz (1990). "What Do We Know about Site-based Management: a Case Study of The Literature-A Call for Research." In *Choice and Control in American Education*, Vol. 2, 289 – 342, ed. W. H. Clune and J. F. Witte. London: Falmer Press.
- Munipah, Pardini, A. (2010). "Menabung Gula untuk Pendidikan." Laporan Program Pemberdayaan Komite Sekolah untuk Mendukung Kegiatan Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Gerakan Lima Kilogram gula Kelapa di Kec. Ciracap Kab. Sukabumi Jawa Barat, ed. Kurniawan, H. D. Tidak Diterbitkan.
- Patrinis, H., and Ruth Kagia (2007). "Maximizing The Performance of Education Systems: The Case of Teacher Absenteeism." In *The Many Faces of Corruption-Tracking Vulnerabilities at the Sektor Level*, ed. J. E. Campos and S. Pradhan. Washington, DC: World Bank.
- Sa'ud, Udin S. (2005). "Faktor Determinan Pelaksanaan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar." *Jurnal Mimbar Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia*. No. 1 Tahun XXIV 2005, pp. 4 – 12.
- Shoraku, A. (2005). "School-Parent Partnerships in School-Level Management: A Case Study of Primary Schools in Cambodia." *Asian Educational Study Monographs*, No. 5, pp. 15 – 29.
- Shoraku, A. (2008b). "A Case Study of Parental Participation in Primary School Education in Kampong Chhnang Province, Cambodia." *Comparative Education*, No. 36, pp. 3 – 24, *Bulletin of The Japan Comparative Education Society*.
- Suparlan, Pradhan, M., dan Beatty, A. (2010). "Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Hasil dari Percobaan Lapangan Acak di Indonesia." Disajikan di Simposium Nasional Hasil Penelitian dan Inovasi Pendidikan, Balitbang – Kemdiknas, 3 – 5 Agustus 2010.